

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskursus kekuasaan merupakan satu hal menarik yang tidak pernah selesai dibahas. Hal ini telah dimulai semenjak era Yunani klasik dan terus berlangsung sampai saat ini. Berbagai pemikiran dari berbagai zaman lahir dengan coraknya tersendiri. Dimulai oleh para pemikir klasik yang pada umumnya mengaitkan Politik/Kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan (Budiardjo, 2017). Pemaknaan dan bagaimana cara memahami Politik saat itu tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan Romawi Kuno dan Kerajaan Islam sehingga wajar jika berbagai pemikiran saat itu sangat lekat dengan unsur Teologis. Corak Pemikiran saat itu menganggap bahwa kekuasaan/politik hanya sebagai alat mengabdikan untuk mencapai tujuan negara, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak serta untuk kemuliaan Tuhan.

Di abad modern hingga kontemporer, diskursus kekuasaan tetap menjadi wacana yang senantiasa diperbincangkan. Pengelolaan kekuasaan merupakan isu yang selalu terbaharui. Diskursus ini tetap penting terutama ketika umat manusia berkepentingan untuk terus menemukan cara bagaimana menyeimbangkan kekuasaan. Jika distribusi kekuasaan seimbang, maka keamanan baik dalam tingkatan lokal, nasional, regional hingga internasional otomatis akan bisa dijamin.

Keseimbangan distribusi kekuasaan adalah cita-cita semua bangsa. Keseimbangan kekuasaan dibutuhkan persis di saat kekuatan bersenjata dan militerisme antarnegara seolah sampai pada taraf yang sangat kompetitif dan sangat riskan, sehingga mengkhawatirkan terjadinya perang. Penindasan dan perlakuan yang tidak adil akan berkurang dengan sendirinya jika konsep kekuasaan bisa dibenahi. Tatanan Dunia dengan kekuasaan yang berimbang adalah tatanan Dunia sebagaimana yang diharapkan.

Dalam prosesnya, diskursus kekuasaan mengalami peralihan paradigma yang begitu signifikan sejak dimulainya zaman modern yang ditandai dengan keruntuhan Gereja serta kemunduran Kerajaan Islam. Diskursus kekuasaan yang pada mulanya bersifat Etis dan tidak dapat dilepaskan dari Doktrin Teologis Abad Pertengahan karena kuatnya pengaruh Gereja dalam Kehidupan Masyarakat, mulai beralih dan dianggap Pragmatis yang membawa semangat Pencerahan yang Humanis lagi Antroposentris. peralihan Paradigma itu membawa dampak Praktis dalam praktik Pemerintahan di seluruh Dunia.

Diskursus kekuasaan mengalami transisi secara perlahan ke arah pragmatisme politik dalam periode Sejarah yang berbeda di berbagai Negara. Niccolo Machiavelli sebagai salah satu pelopor pemikir politik modern, di dalam bukunya *Il Principe* ia menekankan dalam Politik yang utama bukanlah persoalan Etika dan Moral, melainkan bagaimana merebut serta mempertahankan Kekuasaan (Machiavelli, 2008). Etika dan Moral hanya berguna sejauh ia dapat dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Berbagai filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean- Jacques Rousseau juga yang mulai menggali konsep-konsep tentang kontrak sosial dan legitimasi politik berdasarkan rasionalitas manusia dan hak-hak alami. Meskipun etika masih menjadi komponen penting, ada pergeseran menuju pemahaman yang lebih praktis tentang bagaimana pemerintahan harus berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kebebasan. Revolusi di amerika dan prancis pada akhir abad 18 pun menjadi fase transisi dimana diskursus etis menuju ke ranah praktis dalam ranah Struktural Pemerintahan. Revolusi-revolusi ini mengedepankan gagasan bahwa tujuan politik yang

utama adalah mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara yang paling efektif. Pragmatismenya tercermin dalam dokumen seperti Konstitusi Amerika Serikat, yang menekankan mekanisme checks and balances untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, sebuah langkah yang sangat pragmatis meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip etika tertentu.

Di kemudian hari, perkembangan ilmu pengetahuan yang turut mempengaruhi dikursus kekuasaan pada akhir abad 19 hingga awal abad 20 melahirkan berbagai disiplin ilmu, terkhusus Ilmu Sosial Modern. Sosiologi yang dulunya bernama Fisika Sosial dan Ilmu Politik yang sebelumnya tidak terpisahkan dari ekonomi mulai berkembang dan menjadi disiplin ilmu tersendiri yang menekankan pada analisis empiris dan metodologis pada fenomena politik. Pemikir seperti Max Weber memperkenalkan konsep "Etika Tanggung Jawab" (Ethic of Responsibility), yang lebih menekankan pada konsekuensi praktis dari tindakan politik daripada idealisme etis. Bersamaan dengan berkembangnya Ilmu Sosial, Pragmatisme juga berkembang menjadi salah satu aliran filsafat yang dipelopori oleh Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey, yang mana pemikir-pemikir tersebut menekankan bahwa kebenaran dan makna ide harus dinilai berdasarkan konsekuensi praktisnya. Dalam politik, ini diterjemahkan ke dalam pendekatan yang lebih fokus pada hasil nyata daripada prinsip moral yang abstrak.

Pada pertengahan abad 20, setelah melalui Perang Dunia 1 dan 2 yang kemudian berlanjut pada perang dingin antar 2 ideologi besar saat itu, membawa pergeseran lebih jauh menuju realitas politik yang menekankan kepentingan nasional dan strategi praktis. Pemikir seperti Hans Morgenthau dalam teori hubungan internasional mempromosikan pendekatan yang menekankan kekuatan dan kepentingan sebagai dasar kebijakan luar negeri, mengesampingkan pertimbangan moralitas yang idealis. Ini terus berlanjut hingga sekarang dan tentu saja berdampak ke seluruh dunia, khususnya Indonesia.

Indonesia pasca Orde baru tidak lepas dari pengaruh Global dalam pergeseran paradigma dan diskursus politik. Indonesia yang sedang berusaha untuk transisi ke arah yang demokratis menuntut pendekatan pragmatis untuk mengatasi berbagai tantangan seperti stabilitas politik, reformasi ekonomi, dan desentralisasi. Dalam konteks ini, banyak politisi dan pembuat kebijakan Indonesia mengadopsi pendekatan pragmatis dengan dalih untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proses demokratisasi, meskipun kadang-kadang dengan mengorbankan idealisme etis.

Sejak turunnya Soeharto yang menjadi penanda dimulainya Reformasi, sistem politik Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek. Di Tingkat Makro, terjadi perubahan corak pemerintahan yang sebelumnya dapat dikatakan otoriter kemudian menuju ke arah yang lebih demokratis dibanding sebelumnya. Misalnya, secara Parsial Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami perubahan, dari yang sebelumnya Sentralistik menjadi Desentralistik. Perubahan lain yang dirasakan adalah adanya sistem Multi Partai, pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, dan adanya kebebasan pers. Tentunya transisi dan bagaimana cara memahami konsep hingga praktik Demokrasi tidak lepas dari situasi global dimana keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1990 menjadi penanda pada apa yang disebut oleh Francis Fukuyama sebagai Kemenangan Demokrasi Liberal (Amerika Serikat).

Jatuhnya pemerintahan Soeharto dapat dikatakan sebagai Akumulasi dari kemarahan dan kemarahan Masyarakat Indonesia atas berbagai permasalahan yang begitu kompleks selama 32 Tahun Pemerintahan beliau. Kejatuhan Orde Baru bukan hanya soal Krisis Moneter belaka, lebih dari itu merupakan Akumulasi Gerakan Sosial Politik Masyarakat yang kemudian memuncak pada Mei 1998 oleh Gerakan Mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Pemilu selama Orde baru hanya menjadi

sekedar Formalitas belaka. Harapan Masyarakat dulunya Ketika Transisi kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto adalah pemerintahan yang lebih Demokratis justru yang terjadi sebaliknya. Rezim Otoriter justru tetap ada dan terjadi lebih sistematis di dalam tubuh Pemerintahan. Pemilu yang semestinya menjadi ruang Partisipasi Masyarakat dan sebagai salah satu indikator Demokratisnya suatu negara hanya menjadi formalitas belaka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berbagai kecurangan yang sistematis, penegakan Hukum yang lemah, dan kebebasan pers yang dibungkam membuat kehidupan politik yang diharap demokratis redup. Para konstituen yang duduk di kursi dewan tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat, justru kebanyakan hanya membawa kepentingan kelompok. Secara keseluruhan, pemilu pada masa orde baru tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya karena adanya dominasi pemerintah dan Golkar, serta berbagai bentuk kecurangan dan tekanan terhadap oposisi. Tentu semua data itu berangkat dari fakta bahwa pemerintahan Soeharto yang otoriter serta korup. Setelah jatuhnya beliau, Indonesia mulai melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem politik dan pemilu untuk memastikan proses yang lebih adil dan demokratis. Berbagai perubahan yang terjadi pasca orde baru dalam kehidupan politik Indonesia diwujudkan dalam berbagai Kebijakan.

Berbagai langkah besar yang dilakukan dalam rangka konsolidasi demokrasi menemui berbagai tantangan dan dirasa mengalami Stagnasi. Ruang-ruang demokratis seperti Pemilu yang dibuka justru dirasa di politisasi oleh berbagai pihak dalam rangka kepentingan pribadi/kelompok. Politikus Indonesia dari berbagai partai dan tingkatan pemerintahan telah menikmati dan dengan sukses memanfaatkan sistem pemilu yang relatif bebas dan terbuka sejak 1999. Elite-elite lama yang mapan secara cepat beradaptasi dengan permainan elektoral borjuis ini dan memantapkan posisinya tatkala Indonesia mengalami transisi politik dari kediktatoran menuju demokrasi, sebuah kesempatan yang juga dimanfaatkan oleh pemain-pemain baru seperti kelas kapitalis/kalangan pebisnis lokal. Dulu ilmuwan politik Benedict Anderson memperingatkan kita bahwa pemilu di Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan indikasi bagi dominasi politik borjuis. Proses demokratisasi pasca Orde Baru yang tidak benar-benar terealisasi dengan baik termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Kejahatan-kejahatan Orde Baru yang tidak benar-benar hilang justru hanya bermutasi dan berubah bentuk dalam praktik, salah satunya dalam Relasi Ekonomi Politik (Nathaniel, 2021). Keruntuhan orde baru tidak benar-benar diikuti dengan jatuhnya basis relasi ekonomi politik Soeharto beserta kroni-kroninya. Para analis yang menggunakan perspektif analisis Kelas menganggap keruntuhan orde baru tidak diikuti dengan proses Demokratisasi. Dasar argumentasi yang dikemukakan Eric Hiariej misalnya, ia mengatakan pada dasarnya kekuasaan Soeharto bersandar pada dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang dominan. Kejatuhan Soeharto tidak diikuti dengan kehancuran basis ekonomi politik dari sekutu-sekutunya. Hal ini membuat mereka berhasil mengamankan posisinya di pemerintahan baru, rekanan bisnis Soeharto juga masih menjadi faktor penentu dalam proses pemulihan Ekonomi pasca Reformasi (Hiariej, 2005; Robison dan Hadiz, 2004).

Berbagai Upaya serta usaha dalam proses demokratisasi beberapa dekade terakhir pasca Orde Baru, lebih khususnya dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia yang seharusnya dan semestinya menjadi ruang terbuka dalam rangka agenda demokratisasi justru telah menjadi arena dimana kebenaran dan kebohongan bercampur aduk. Hal ini membawa konsekuensi logis berupa terbangunnya ketidakpastian politik (Gunawan & Barito 2021). Pemilu, seperti kebanyakan negara di dunia termasuk Indonesia kerap kali menjadi tempat bersarang dan berkembang biak pada apa yang disebut sebagai Post-Truth. Politik bukan lagi menjadi arena pertarungan gagasan yang berbasis argumentasi rasional lagi Empiris, tapi justru menjadi ruang-ruang irasional lagi emosional yang berakar pada kekhawatiran dan ketakutan personal. Data dan fakta

menjadi subordinat dari ketakutan berbasis emosional yang membuat batas kebenaran dan kebohongan sulit dibedakan. Keberlimpahan informasi tanpa kemampuan analitis untuk memilah mana yang benar dan salah tentu saja membajak salah satu prinsip demokrasi, yaitu Freedom Of Expression yang dipakai untuk kepentingan segelintir dan merugikan khalayak umum. Tentunya beragam faktor yang membuat situasi ini terjadi, salah satunya ada pada Sistem Politik Indonesia.

Reformasi yang telah berjalan selama 26 tahun dan sejak awal hadirnya membawa semangat kebebasan serta harapan akan perbaikan sistem Politik belum benar-benar dapat tercapai. Sistem politik Indonesia dirasa tidak mengalami begitu banyak perubahan yang baik jika dibandingkan dengan orde baru. Kebobrokan sistem politik Indonesia dan makin menjauhnya semangat reformasi saat ini membawa 1 problem etis yang secara sadar atau tidak sadar hadir sebagai satu preferensi politik kebanyakan masyarakat hari ini, yaitu *The Lesser Evil*.

Secara umum, Konsep "*The Lesser Evil*" (keburukan yang lebih kecil) dalam kehidupan manusia mengacu pada situasi di mana seseorang harus memilih antara dua opsi yang keduanya tidak ideal atau buruk, tetapi salah satu opsi dianggap memiliki konsekuensi yang lebih sedikit atau lebih ringan dibandingkan yang lain. Ini adalah dilema moral yang sering dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks individu maupun sosial. Secara khusus, konsep "*The Lesser Evil*" dalam politik mengacu pada situasi di mana pemilih, politisi, atau pembuat kebijakan dihadapkan pada pilihan antara dua atau lebih opsi yang tidak ideal atau sama-sama buruk, tetapi salah satu opsi dianggap memiliki konsekuensi yang lebih ringan atau lebih sedikit negatif dibandingkan yang lain. Ini sering kali terjadi dalam konteks sistem politik yang kompleks dan penuh tantangan.

Diskursus *The Lesser Evil* merupakan wacana yang akhir-akhir ini sedang naik daun di Indonesia, terkhusus dalam Momen Pemilu. Wacana ini digaungkan oleh Pemikir Filsafat sekaligus Pastor, yaitu Franz Magnis Suseno. *The Lesser Evil* Populer dijadikan sebagai suatu prinsip moral terkhusus keharusan memilih di dalam kontesfasi Politik Elektoral, yaitu Pemilu (Fallderama, 2019).

Konsep "*The Lesser Evil*" memiliki akar yang kuat dalam sejarah pemikiran moral dan politik. Dari zaman kuno hingga era modern, gagasan ini telah digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan keputusan yang sulit dalam berbagai konteks. Meskipun kontroversial, dalam kerangka etika politik, "*The Lesser Evil*" adalah konsep yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam membuat keputusan yang memiliki konsekuensi moral. Ini adalah pendekatan yang realistis yang mengakui bahwa dalam banyak situasi politik, tidak ada solusi yang sempurna, dan pengambil keputusan harus menimbang konsekuensi dari berbagai opsi yang tersedia untuk memilih yang paling tidak merugikan.

Salah satu tokoh yang secara pemikiran dapat diangkat dalam diskursus wacana *The Lesser Evil* adalah seorang filsuf prancis bernama Michel Foucault. Beliau merupakan seorang ahli teori sosial prancis, filsuf, sejarawan, dan intelektual publik yang secara politik dan intelektual aktif sampai kematiannya. Dia dikenang karena metodenya menggunakan penelitian sejarah untuk menjelaskan perubahan wacana seiring waktu, dan hubungan yang berkembang antara wacana, pengetahuan, institusi, dan kekuasaan. Karya Foucault menginspirasi sosiolog di berbagai subbidang termasuk sosiologi pengetahuan; gender, seksualitas dan teori aneh ; teori kritis ; penyimpangan dan kejahatan; dan sosiologi pendidikan.

Sejalan dengan bagaimana Foucault menganggap kekuasaan bekerja sebagai suatu yang tak terdefiniskan dan tidak dapat diukur, Ia ada dimana- mana dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebatas ranah struktural atau ruang-ruang formal saja.

Pemikiran-pemikiran Foucault sering kali berfokus pada hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan subyektivitas. Berbagai pemikiran tersebut dapat dikatakan saling terkait dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Dengan menggunakan metode arkeologi dan genealogi, Foucault mengeksplorasi bagaimana berbagai diskursus dan praktik sosial terbentuk dan bagaimana mereka beroperasi untuk mengatur dan membentuk individu dan Masyarakat (Wandalibrata, 2019). Konsep-konsep seperti panoptikon, biopolitik, pemerintahan, rezim kebenaran, dan teknologi diri menunjukkan bagaimana kekuasaan tersebar dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Konteks Kuasa dan Pengetahuan, Foucault menganggap keduanya adalah dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan tidak hanya menindas atau mengendalikan, tetapi juga menciptakan pengetahuan (Foucault, 2002). Foucault menolak pandangan tradisional bahwa kekuasaan hanya berada di tangan pemerintah atau kelompok tertentu. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kekuasaan tersebar di seluruh struktur sosial dan ada dalam semua interaksi manusia. Kekuasaan bukan sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi sesuatu yang dijalankan dan dipraktikkan.

Dalam pemikiran Michel Foucault, konsep "*The Lesser Evil*" (kejahatan yang lebih kecil) dapat dilihat dalam konteks analisisnya terhadap kekuasaan, pengetahuan, dan praktik pemerintahan. Foucault tidak secara eksplisit menggunakan istilah "*The Lesser Evil*," tetapi konsep ini bisa dihubungkan dan dikontekstkan dengan beberapa ide utama dalam karyanya, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan, biopolitik, dan pengekangan kekuasaan. Foucault tidak memberikan panduan normatif tentang bagaimana memilih "*The Lesser Evil*" layaknya Romo Magnis Suseno, tetapi ia memberi kita suatu pisau analisis memahami bagaimana kekuasaan dan pemerintahan membuat keputusan yang kompleks dan sering kali dilematik, yang mencoba menyeimbangkan antara berbagai kepentingan dan risiko. Foucault lebih tertarik pada bagaimana pilihan-pilihan ini dibuat dan apa implikasinya bagi masyarakat, daripada menawarkan solusi moral atau etis yang jelas.

Diskursus *The Lesser Evil* ini perlu dilacak lebih jauh sebagai mekanisme/modus operandi kekuasaan karena prinsip etis ini menjadi pilihan politik yang entah disadari atau tidak, hadir sebagai pilihan utama membentuk dan masyarakat kita saat ini. Selain itu, bagaimana pengaruh dan konsekuensi logis dari prinsip ini pada kehidupan politik Indonesia menjadi sangat penting.

Penelitian ini juga diharap akan menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir kita dalam melihat *The Lesser Evil* dalam kacamata pemikiran Michel Foucault dengan melihat dari perspektif lain dalam melihat sejauh apa kekuasaan bekerja sampai pada ranah etis dalam keseharian masyarakat. Implikasi materiil dari prinsip *The Lesser Evil* pada kehidupan politik Indonesia menjadi penting pula digali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah Etika *The Lesser Evil* sebagai Preferensi Politik Inheren dalam diri Manusia atau dikondisikan dalam Sistem?
2. Apa konsekuensi Logis dari Prinsip *The Lesser Evil* sebagai Preferensi Politik pada Kehidupan Politik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Menganalisis prinsip etis *The Lesser Evil* pada diri manusia dalam kacamata pemikiran Michel Foucault serta konsekuensi logis dari *The Lesser Evil* sebagai preferensi politik pada kehidupan politik Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman tentang bagaimana Prinsip *The Lesser Evil* bekerja dan hadir dalam kehidupan Politik Indonesia dalam kerangka pemikiran Michel Foucault. Kita akan melihat Diskursus *The Lesser Evil* dalam perspektif yang baru sehingga dapat membawa kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman teori politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya pengetahuan teoritis tentang politik dan kekuasaan, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata kelola dan praktik politik di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023 yang ditulis oleh Yohanes Alfrid Aliano dan Mathias Jebaru Adon berasal dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang dengan judul "Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu '2024" di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault". Fokus dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam makna Politik Kekuasaan Michel Foucault dalam sistem demokrasi percaturan politik Pemilu '2024' di Indonesia. Peneliti menempatkan sistem pemilu dalam ranah pemilu 2024 sebagai pemantik untuk menganalisis lebih mendalam diskursus mengenai politik genealogi kekuasaan di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir perlu di diskusikan dalam diskursus politis-filosofis. Tujuan dari penelitian ini mengurai nilai filsafat etika Michel Foucault terhadap sistem demokrasi di Indonesia yang mulai mendapat perhatian khusus menjelang pemilu 2024. Etika kekuasaan Foucault memaksudkan peran demokrasi Indonesia yang tetap berada pada landasan konstitusional demokrasi yang berkedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penelitian ini menunjukkan bahwa genealogi politik kekuasaan merupakan sistem demokrasi

yang cacat bagi Pemerintah Indonesia karena cenderung berseberangan dengan nilai etis Pancasila dan UUD 1945. Maka, diperlukan kebijaksanaan berpikir kritis filosofis untuk mempertanyakan asal-usul, konstruksi, dan efek dari praktik-praktik kekuasaan yang ada dalam pemilu dengan nilai etis pemikiran Michel Foucault, sehingga setiap orang yang memainkan percaturan politik itu tetap berlandaskan pada landasan konstitusional Negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menganalisis kritik Michel Foucault terhadap sistem pemilu di Indonesia berdasarkan pandangannya tentang kekuasaan dan pengetahuan. Kebaruan dan menjadi Pembeda dari Penelitian ini adalah fokusnya pada *The Lesser Evil* saja sebagai satu prinsip etis yang ada dan menjadi preferensi politik masyarakat Indonesia kebanyakan hari ini.

Kedua, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2018 yang ditulis oleh Konrad Kebung berasal dari STFK Ledalero Maumere dengan judul “Membaca Kuasa Michel Foucault dalam konteks ‘Kekuasaan’ Indonesia.” Penelitian ini membahas bagaimana konsep kekuasaan menurut Foucault diterapkan dalam berbagai konteks politik di Indonesia. Penelitian ini mengkaji kekuasaan, pengetahuan, dan etika sebagaimana dipraktikkan dalam sejarah pemikiran sistem kekuasaan di Indonesia. Penulis ingin memfokuskan perhatian pada pemahaman dan analisis Foucault tentang kuasa, dan bagaimana analisis itu bisa berbicara untuk konteks-konteks kekuasaan di banyak negara, terutama di Indonesia.

Dalam seluruh analisisnya, Foucault tidak pernah secara langsung melontarkan kritiknya terhadap kebijakan politis atau sosial- kemasyarakatan yang berlaku di negara tertentu. Beberapa kasus yang menonjol tentang reaksi para cendekiawan terhadap kebijakan pemerintah atau partai komunis juga melibatkan Foucault, tetapi itu lebih dalam gerakan massa yang menuntut sesuatu dari pemerintah atau partai.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan pemikiran Foucault dipraktikkan pada konteks kehidupan politik Indonesia. Yang menjadi pembeda sekaligus kebaruan dari penelitian yang penulis akan teliti terletak pada fokusnya, yaitu pada prinsip etis *The Lesser Evil* sebagai suatu preferensi politik dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia.

Ketiga, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Taryudi dan Tatan Setiawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul “Tafsir dan Kekuasaan Politik Indonesia”. Penelitian ini berupaya membahas corak pemikiran tafsir di Indonesia di tengah dinamika kekuasaan yang mengitarinya. Teori relasi kuasa dan pengetahuan Michel Foucault menjadi jembatan untuk merangkai relasi antara tafsir dan politik kekuasaan di Indonesia. Melalui pemikirannya, tampak ada relasi antara kekuasaan yang ada dalam konteks ini terepresentasi dalam periodisasi politik kekuasaan pada tiga era kekuasaan di Indonesia, yaitu orde lama, orde baru, dan reformasi dimana pengetahuan yang terwakili dalam produk pemikiran tafsir para mufasirnya disesuaikan dengan era kekuasaannya. Tulisan ini juga menjabarkan salah satu konsep dari

pemikiran Foucault, yaitu Governmentality yang menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik. Konsep ini merupakan perluasan dari model kekuasaan disciplinary power pada level negara. Governmentality adalah bentuk rasionalisasi dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara agar beroperasinya kekuasaan itu mendapatkan legitimate. Melalui Governmentality, kekuasaan di internalisasi dalam tubuh sosial. Negara mengatur tindakan atau perilaku Masyarakat dengan menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia yang dikaitkan dengan faktor politik. Politik yang dimaksud adalah kekuasaan. Jadi persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas lanskap pemikiran Michel Foucault dalam konteks politik kekuasaan Indonesia. Kebaruan dari penelitian penulis dan menjadi pembeda adalah lokus penelitian ini direduksi pada prinsip *The Lesser Evil* sebagai suatu preferensi politik dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia.

Keempat, Penelitian yang kemudian telah dibukukan dan terbit pada tahun 2016 yang ditulis oleh Vincentius Damar berasal dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dengan judul "Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik." Penulis mencoba untuk mengajak pembaca untuk melakukan refleksi filosofis setidaknya untuk memahami secara mendasar tentang apa itu baik-buruk dan benar- salah dalam kehidupan, lebih terkhusus dalam Kehidupan Politik.

Tentu ini sejalan dengan apa yang akan diteliti oleh Penulis, yaitu terkait *The Lesser Evil* yang membahas suatu pilihan yang paling sedikit buruknya, atau pilihan terbaik diantara yang terburuk. Kebaruan dan menjadi pembeda yang akan penulis hadirkan dalam penelitian ini adalah membahas *The Lesser Evil* dari kacamata pemikiran Michel Foucault..

1.5.2 Kerangka Konsep

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa kerangka konsep yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang prinsip etis *The Lesser Evil* pada kehidupan politik Indonesia dalam pemikiran Michel Foucault. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan konsep tersebut dalam beberapa aspek berikut:

1.5.2.1 *The Lesser Evil*

Ilmu politik adalah disiplin akademis yang mempelajari teori dan praktik politik, sistem pemerintahan, dan analisis politik. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, dan dipertahankan serta bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan. Ilmu politik menawarkan alat dan kerangka kerja untuk memahami dinamika kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan dalam masyarakat. Dengan mempelajari konsep-konsep utama seperti kekuasaan, negara, pemerintahan, demokrasi, kebijakan publik, ideologi politik, hak asasi manusia, globalisasi, kelompok kepentingan, partai politik, dan teori

politik, kita dapat lebih baik mengerti bagaimana keputusan politik diambil dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dalam perkembangan politik dari masa ke masa, ada berbagai Paradigma dalam memahami dan mengartikan politik itu seperti apa. Ada satu fase dimana perbincangan dan cara pandang masyarakat dalam melihat politik dalam kerangka etika dan moral. Fase ini adalah fase dimana politik dilihat sebagai cara untuk memenuhi tujuan bersama. Moralitas dalam politik memainkan peran penting dan menjadi prinsip utama dalam menjalankan suatu Pemerintahan (Suryajaya, 2016).

Moralitas dalam politik mengacu pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang memandu tindakan dan keputusan para pemimpin politik dan pembuat kebijakan. Konsep ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: Apa yang membuat tindakan politik benar atau salah? Apa yang membuat kebijakan politik baik atau buruk? Bagaimana kita harus menilai keputusan politik dari perspektif moral?

Salah satu prinsip fundamental dalam moralitas politik adalah bahwa tindakan politik harus mempromosikan kebaikan bersama. Kebijakan dan keputusan politik harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan sekelompok kecil individu atau kelompok tertentu. Moralitas dalam politik adalah bidang yang kompleks dan sering kali penuh dengan dilema etis. Prinsip-prinsip seperti kebaikan bersama, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, utilitarianisme, kewajiban moral, integritas, dan transparansi semuanya memainkan peran penting dalam menilai tindakan dan kebijakan politik. Politik adalah arena di mana keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat diambil dan dijalankan. Dalam proses ini, konsep benar-salah dan baik-buruk memainkan peran yang sangat penting. Namun, dalam konteks politik, penilaian tentang apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang baik dan apa yang buruk, sering kali menjadi sangat kompleks. Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepentingan yang beragam, kekuasaan yang terdistribusi secara tidak merata, dan situasi sosial yang berubah-ubah.

Di dunia politik, keputusan yang diambil jarang bersifat hitam- putih. Sebaliknya, politisi dan pembuat kebijakan sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit dan harus mempertimbangkan banyak aspek yang saling bertentangan. Misalnya, kebijakan yang mungkin baik untuk pertumbuhan ekonomi belum tentu baik untuk lingkungan, atau keputusan yang menguntungkan satu kelompok masyarakat mungkin merugikan kelompok lain. Semestinya dan seharusnya politik adalah jalan dimana menjadi tempat bertemunya berbagai Kepentingan yang ke semuanya bermuara pada Kebahagiaan.

Ada berbagai tradisi memahami etika dan moral di dalam politik dan itu terbagai dalam fase-fase zaman yang di isi berbagai oleh Pemikiran banyak tokoh di dalamnya. Tradisi- tradisi tersebut berkuat pada pemahaman

seperti apa Kebaikan di dalam memahami Politik itu seperti apa dan bagaimana.

Pada zaman Klasik, yaitu zaman Yunani Kuno, ada 2 pemikir politik yang memaknai bagaimana itu kebaikan yang seharusnya di dalam Politik. Plato, di dalam Bukunya Republik mengenalkan Konsep Kebaikan Tertinggi. Plato mengajarkan bahwa tujuan akhir dari politik adalah mencapai kebaikan tertinggi (Plato, 2022). Dalam "Republik," dia menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh filsuf-raja yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan tertinggi. Bagi Plato, politik yang benar adalah yang mengarahkan masyarakat menuju kebaikan ini. Aristoteles juga di dalam Bukunya "Etika Nikomakea" mengajarkan bahwa kebajikan (*virtue*) adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang baik (*eudaimonia*). Politik yang baik harus mempromosikan kebajikan dan kesejahteraan warganya. Hingga abad pertengahan, Diskursus Politik di dominasi dan dibicarakan dalam kerangka Etis (Aristoteles, 2020).

Pada zaman Modern, masa Dimana Dominasi Gereja telah runtuh, Ilmu pengetahuan berkembang dengan Pesat dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan Paradigma dalam memandang Manusia yang sebelumnya dianggap tidak punya kebebasan dalam mengambil Keputusan di hidupnya karena Paus dan Gereja yang menjadi pemegang Kebenaran tertinggi runtuh. Manusia mulai sadar bahwa di hidupnya, ia punya kehendak bebas dalam menentukan hidupnya seperti apa. Runtuhnya dominasi Gereja juga berpengaruh pada aspek politik. Diskursus etis dalam politik mulai secara perlahan tergantikan. Adalah Niccolo Machiavelli yang menjadi pelopor pemikir politik modern. Pemikiran politiknya yang teguh pada pragmatisme politik banyak dipakai oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya sampai sekarang. Apa yang benar-salah dan baik-buruk dalam politik hanya dianggap penting sejauh ia sejalan dengan kepentingan dalam merebut dan mempertahankan *status-quo*. Tentu saja itu membawa konsekuensi bias Etis dalam politik.

Konsep "*The Lesser Evil*" (kejahatan yang lebih kecil) dalam diskursus etika politik mengacu pada prinsip memilih tindakan atau kebijakan yang memiliki konsekuensi negatif paling sedikit dibandingkan dengan alternatif yang ada. Ini adalah pendekatan pragmatis yang sering kali dihadapi oleh politisi dan pembuat kebijakan dalam situasi di mana semua pilihan yang tersedia mengandung elemen negatif atau merugikan.

Prinsip "*The Lesser Evil*" sering kali dihubungkan dengan Utilitarianisme, yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks ini, memilih "*The Lesser Evil*" berarti memilih opsi yang menyebabkan kerugian paling sedikit atau manfaat terbesar relatif terhadap alternatif lain.

Konsep "*The Lesser Evil*" dalam kehidupan politik Indonesia dapat dilihat dalam berbagai situasi di mana politisi, pemerintah, dan pemilih harus membuat pilihan di antara opsi-opsi yang semuanya memiliki kelemahan atau dampak negatif. Misalnya dalam pemilu, baik pada tingkat nasional

maupun daerah, pemilih sering kali dihadapkan pada pilihan antara kandidat yang tidak sempurna. Pemilih mungkin memilih kandidat yang dianggap paling tidak buruk di antara yang ada, dengan harapan bahwa mereka akan membawa perbaikan atau menghindari kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan kandidat lain. Koalisi dalam politik pun tidak seperti layaknya hubungan pertemanan yang dilakukan tanpa pamrih. Koalisi antara partai-partai politik sering kali didasarkan pada kompromi dan pragmatisme. Partai-partai mungkin bergabung dengan mitra koalisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ideologi mereka, tetapi pilihan tersebut dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai stabilitas politik atau memenangkan pemilu. Selain itu, dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, pemerintah sering kali dihadapkan pada dilema di mana semua opsi yang tersedia memiliki konsekuensi negatif. Memilih "*The Lesser Evil*" berarti memilih kebijakan yang dampak negatifnya paling sedikit bagi masyarakat. Dalam aspek menangani isu-isu keamanan dan konflik, pemerintah juga mungkin harus membuat keputusan sulit yang melibatkan tindakan kontroversial untuk menghindari situasi yang lebih buruk. Melihat secara historis diskursus politik dari berbagai zaman dalam dimensi etika dan moral, dan melihat bagaimana pragmatisme politik melahirkan prinsip "*The Lesser Evil*" dalam kehidupan politik hingga sekarang.

1.5.2.2 Pemikiran Michel Foucault: Kuasa Pengetahuan

Sejarah pemikiran tentang kekuasaan adalah perjalanan panjang yang melibatkan banyak filsuf dan teoretisi yang mencoba memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dalam masyarakat dan bagaimana ia mempengaruhi hubungan antarindividu dan struktur sosial. Pemikiran ini dimulai dari era klasik, berkembang melalui Abad Pertengahan dan era Pencerahan, hingga mencapai analisis kritis dan kompleks dari para pemikir modern seperti Michel Foucault. Berbagai Pemikiran dari berbagai era tersebut terus berkembang dan turut mempengaruhi era Modern sekarang untuk dikembangkan.

Michel Foucault adalah seorang filsuf yang secara mendalam mengeksplorasi konsep kekuasaan dan relasi kuasa dalam masyarakat modern. Pemikiran Foucault tentang kekuasaan sangat kompleks dan berbeda dari pandangan tradisional yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu. Foucault menolak gagasan kekuasaan yang terpusat dan represif, dan sebaliknya memperkenalkan pandangan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang produktif dan tersebar di seluruh struktur sosial.

Ada berbagai tokoh yang konsep serta pemikirannya mempengaruhi dan diadopsi Foucault, seperti Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Sigmund Freud, Karl Marx, dan Emil Durkheim. Nietzsche adalah salah satu pengaruh paling signifikan terhadap Foucault, terutama dalam hal konsep genealogi. Foucault mengadopsi metode genealogis Nietzsche untuk menelusuri asal-usul praktik sosial dan relasi kuasa.. kritik terhadap

moralitas tradisional dan pandangannya tentang "kebenaran" sebagai konstruksi sosial pun sangat mempengaruhi Foucault. Heidegger turut mempengaruhi Foucault dalam hal analisis ontologis dan epistemologis.

Pemikiran Heidegger tentang sejarah, subjektivitas, dan cara manusia berada di dunia (*Being-in-the-world*) mempengaruhi cara Foucault memandang sejarah dan identitas. Selain itu, Freud mempengaruhi Foucault terutama dalam analisis tentang subjektivitas dan kekuasaan. Foucault tertarik pada bagaimana psikoanalisis membentuk cara kita memahami diri kita sendiri dan struktur psikologis kita. Konsep-konsep seperti represi, ketidaksadaran, dan dinamika kekuasaan dalam psikoanalisis memberikan wawasan penting bagi Foucault dalam mengembangkan analisisnya tentang kekuasaan dan pengetahuan. Marx pun menjadi pemikir yang banyak mempengaruhi Pemikiran Foucault. Meskipun Foucault sering mengkritik beberapa aspek Marxisme, terutama ekonomisme dan determinisme, konsep kekuasaan dan ideologi Marx mempengaruhi analisis Foucault tentang struktur sosial dan praktik dominasi. Terakhir, Durkheim turut memberi sumbangsih dalam khazanah pemikiran Foucault. Meskipun Foucault tidak selalu setuju dengan pendekatan fungsionalis Durkheim, pemikiran Durkheim tentang normativitas sosial dan pengaturan sosial memberikan dasar bagi analisis Foucault tentang disiplin dan pengawasan.

Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang ada di mana-mana, menyebar dan menyusup ke dalam semua aspek kehidupan sosial. Ia berargumen bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat negatif, yaitu sebagai kekuatan yang menindas dan membatasi, tetapi juga positif dalam arti bahwa ia menciptakan realitas, menghasilkan domain kebenaran, dan membentuk subjek serta pengetahuan. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, melainkan merupakan jaringan relasi yang kompleks di mana setiap orang secara simultan berada di bawah pengaruh kekuasaan dan juga menjalankannya.

Dalam karya-karyanya seperti *"Discipline and Punish"* dan *"The History of Sexuality"*, Foucault mengeksplorasi bagaimana kekuasaan beroperasi melalui mekanisme disiplin dan pengawasan. Di *"Discipline and Punish"*, ia menganalisis evolusi sistem hukuman dari hukuman publik yang brutal menuju bentuk-bentuk pengawasan yang lebih halus dan internal. Foucault menggambarkan bagaimana institusi seperti penjara, sekolah, rumah sakit, dan pabrik menggunakan teknik-teknik disiplin untuk mengontrol dan mengatur tubuh individu. Dengan memperkenalkan konsep "panoptikon", sebuah desain penjara yang memungkinkan pengawasan terus-menerus terhadap narapidana, Foucault menunjukkan bagaimana pengawasan menjadi mekanisme utama untuk mendisiplinkan masyarakat. Pengawasan ini tidak hanya memantau perilaku, tetapi juga membentuk dan mengarahkan perilaku individu sesuai dengan norma-norma sosial yang diinginkan.

Lebih lanjut, dalam "*The History of Sexuality*", Foucault memperkenalkan konsep Biopolitik untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan modern mengelola populasi melalui kontrol atas kehidupan biologis. Biopolitik mencakup kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, reproduksi, dan demografi. Foucault menunjukkan bagaimana negara menggunakan pengetahuan ilmiah dan medis untuk mengatur kehidupan penduduk dan mengoptimalkan produktivitas mereka. Dengan mengendalikan aspek-aspek fundamental kehidupan, seperti kelahiran, kematian, dan kesehatan, negara dapat mengendalikan populasi dengan cara yang lebih efektif dan subtil. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui ancaman kekerasan atau paksaan, tetapi juga melalui penciptaan dan regulasi norma-norma sosial. Salah satu bentuk Biopolitik yang mungkin dekat dengan keseharian kita sebagai Masyarakat adalah bagaiaman Norma-norma Sosial seperti Sopan Santun dalam setiap interaksi Masyarakat.

Foucault juga membahas konsep governmentality, yaitu teknik dan strategi pemerintahan yang digunakan untuk mengatur perilaku populasi. Dalam kuliahnya di Collège de France, Foucault mengeksplorasi bagaimana berbagai teknik pemerintahan berkembang dari Abad Pertengahan hingga era modern, mencakup praktik administrasi, ekonomi, dan kebijakan sosial. Ia menunjukkan bahwa pemerintahan modern tidak hanya berusaha untuk mengendalikan individu secara langsung, tetapi juga untuk membentuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong individu untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan. Ini mencakup berbagai bentuk regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk mengarahkan perilaku masyarakat, dari program kesehatan masyarakat hingga kebijakan pendidikan dan kesejahteraan.

Selain itu, Foucault menekankan bahwa kekuasaan selalu terkait dengan pengetahuan. Dalam pandangannya, kekuasaan dan pengetahuan saling membentuk dan mendukung satu sama lain, suatu konsep yang ia sebut sebagai "*power/knowledge*". Pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral atau obyektif, tetapi selalu terikat dengan relasi kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya. Misalnya, pengetahuan medis tentang kesehatan dan penyakit tidak hanya mencerminkan realitas biologis, tetapi juga mencerminkan dan memperkuat relasi kuasa dalam masyarakat. Melalui mekanisme seperti penelitian ilmiah, pendidikan, dan institusi kesehatan, pengetahuan medis membantu mengatur perilaku individu dan populasi, serta mendukung struktur kekuasaan yang ada.

Foucault juga menunjukkan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ selalu ada resistensi. Resistensi bukanlah sesuatu yang berada di luar kekuasaan, tetapi bagian integral dari dinamika kekuasaan itu sendiri. Setiap bentuk kekuasaan akan menghadapi tantangan dan perlawanan, yang pada gilirannya dapat memunculkan transformasi dalam relasi kuasa. Resistensi dapat muncul dalam berbagai bentuk, dari tindakan individu yang menolak norma-norma sosial hingga gerakan sosial yang berusaha mengubah

struktur kekuasaan yang ada. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah absolut dan selalu rentan terhadap perubahan.

Dalam keseluruhan pemikirannya, Foucault memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui berbagai mekanisme dan institusi dalam masyarakat modern. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif, membentuk subjek dan pengetahuan, serta mengatur kehidupan sehari-hari. Dengan menyoroti hubungan kompleks antara kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas, Foucault memberikan wawasan yang sangat berharga tentang dinamika kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang memerintah tetapi juga tentang bagaimana hubungan dan struktur sosial dibentuk dan dipertahankan melalui mekanisme yang halus namun mendalam.

1.5.3 Kerangka Pikir

Pasca Orde Baru, kehidupan politik Indonesia tidak mengalami begitu banyak perubahan dari segi kesejahteraan. Reformasi yang membawa Semangat Demokrasi di dalamnya justru hanya membawa Keuntungan untuk segelintir orang saja. Praktik- praktik KKN masih marak terjadi meski orde baru telah lama runtuh. Demokrasi yang dijalankan pasca orde baru pun perlu dilihat apakah benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi yang ada atau justru ia jatuh pada praktik demokrasi semu. Salah satu bentuk manifestasi demokrasi pasca orde baru yang kemudian dihadirkan adalah pemilu elektoral dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu menjadi salah satu Indikator utama di banyak negara hari ini sebagai tolak ukur seberapa demokratis proses bernegara.

Demokrasi semu dalam konteks pemilu merujuk pada situasi di mana meskipun terdapat proses pemilihan umum yang dijalankan secara formal, namun hakikat demokrasi yang seharusnya mengedepankan partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan terancam tereduksi. Dalam pemilu, terdapat sejumlah elemen yang dapat menyebabkan demokrasi semu, salah satunya adalah dominasi kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang mengendalikan jalannya proses pemilihan.

Partai politik atau kandidat yang memiliki kekuatan finansial dan dukungan media yang besar dapat mendominasi narasi politik dan memengaruhi persepsi publik secara signifikan. Ini bisa menghasilkan situasi di mana pemilih tidak lagi membuat keputusan berdasarkan pada informasi yang objektif dan beragam, tetapi dipengaruhi oleh pesan-pesan yang dimaksudkan untuk memanipulasi opini mereka. Selain itu, demokrasi semu juga dapat terjadi ketika terdapat penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan dalam proses pemilihan. Praktek-praktek seperti politik uang, intimidasi pemilih, atau manipulasi hasil pemilu dapat merusak integritas pemilu dan mengurangi legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pemilu yang dianggap menjadi pesta demokrasi dimana masyarakat secara langsung dapat berpartisipasi dalam politik dalam fakta realitas ternyata hanya dilihat sebatas angka dan suara oleh para calon konstituen. Demokrasi semu yang dijalankan di era reformasi sangat terlihat dalam kontestasi politik elektoral ini. Anggapan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan menjadi konstituen adalah anggapan naif, karena nyatanya di dalam proses politik baik itu dalam ruang formal maupun di

balik layarnya berbeda. Kenyataan bahwa pelaksanaan pemilu adalah bentuk demokrasi semu membawa konsekuensi logis berupa Pragmatisme politik bagi para calon Konstituen,

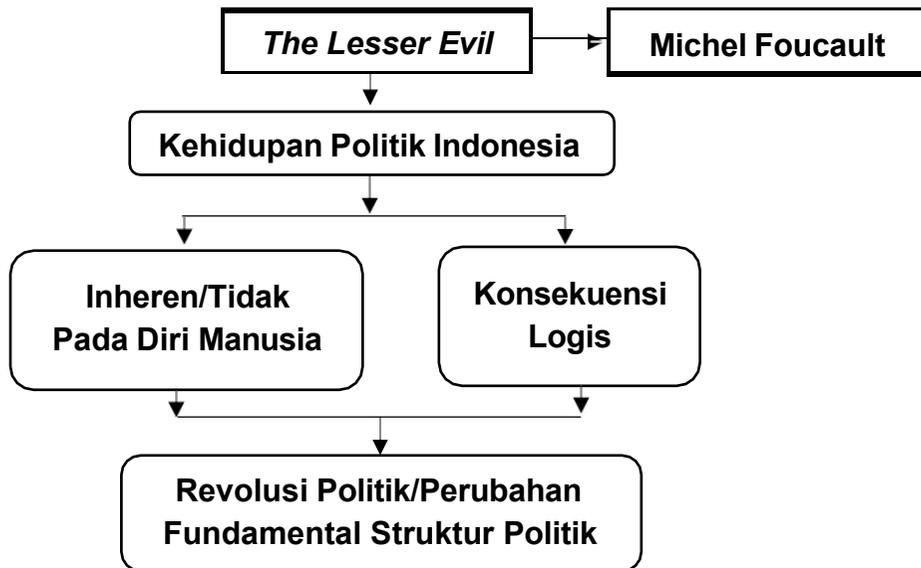
Dalam konteks pemilu, pandangan Foucault tentang kuasa dan pengetahuan dapat memberikan wawasan yang menarik tentang bagaimana konsep "*The Lesser Evil*" (kejahatan yang lebih kecil) dimanifestasikan dan dipersepsikan oleh masyarakat. Foucault menyoroti bahwa kekuasaan bukanlah hanya sesuatu yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga negara, tetapi tersebar di seluruh struktur sosial dan termanifestasi dalam relasi kekuasaan yang kompleks. Dalam kasus "*The Lesser Evil*" dalam pemilu, pemilih dihadapkan pada pilihan antara berbagai opsi yang dianggap sebagai kejahatan atau pilihan yang buruk, tetapi mungkin dianggap sebagai yang lebih baik daripada alternatifnya. Tentu menarik untuk melihat bagaimana masyarakat mempersepsikan baik-Buruk dalam kontestasi politik. Tentu saja dengan berbagai variabel berbeda yang dimiliki masyarakat Indonesia seperti latar belakang pendidikan, suku, agama, ras dan kepentingan kelompok lain menjadikan standar baik-buruk yang sangat beragam dalam politik itu sendiri.

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan juga terkait erat dengan pengetahuan, dan "*The Lesser Evil*" mencerminkan dinamika kekuasaan dan pengetahuan yang saling terkait. Partai politik atau kandidat yang mungkin dianggap sebagai "*The Lesser Evil*" dapat memanfaatkan narasi politik dan pengetahuan yang dibentuk oleh media massa, institusi pendidikan, dan lembaga- lembaga lainnya untuk memperoleh dukungan pemilih. Mereka mungkin menggunakan strategi komunikasi yang cermat untuk membentuk persepsi publik tentang pilihan yang tersedia, memperkuat identitas politik mereka, dan menekankan bahaya atau konsekuensi negatif dari memilih pesaing mereka.

Namun demikian juga, dalam analisis Foucault, "*The Lesser Evil*" tidak hanya mencerminkan penggunaan kekuasaan oleh elite politik, tetapi juga respons dari masyarakat terhadap dinamika kekuasaan yang ada. Pemilih dapat merespons pada narasi dan pengetahuan yang disediakan oleh partai politik atau kandidat tertentu, serta pada pengalaman dan konteks sosial yang mereka alami. Mereka mungkin memilih "*The Lesser Evil*" sebagai strategi pragmatis untuk mengurangi risiko atau dampak negatif dari pilihan politik mereka, meskipun mungkin dengan rasa tidak puas atau ketidaksetujuan terhadap opsi yang tersedia.

Dengan demikian, dalam kacamata Foucault, konsep "*The Lesser Evil*" dalam pemilu mencerminkan kompleksitas dinamika kekuasaan, pengetahuan, dan respons sosial dalam proses politik. Hal ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana kekuasaan dan pengetahuan dijalankan dan digunakan dalam membentuk opsi politik yang tersedia, serta bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi dengan dinamika kekuasaan tersebut dalam konteks pemilihan umum.

1.5.4 Skema Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun data-data utama dan sekaligus tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan cara pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan mempelajari hasil-hasil studi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Tujuan dari tahap ini adalah peneliti menambah wawasan terkait etika "*The Lesser Evil*" pada kehidupan politik Indonesia dalam kacamata pemikiran Michel Foucault. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku-buku, peneliti mengumpulkan beberapa buku terkait *The Lesser Evil* dan beberapa karya Michel Foucault serta beberapa buku penunjang yang kiranya dapat menjadi tambahan data dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat, seperti meminjam dari perpustakaan, membeli di toko buku. Sedangkan setting tempat teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan. Data-data sebagai penjabaran dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditujukan pada etika "*The Lesser Evil*" dalam kacamata pemikiran Michel Foucault.

2.2 Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, data-data yang disiapkan adalah yang bersumber dari literatur atau menggunakan cara *library research* dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material.

1. Sumber Data Primer

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan sumber primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini merupakan data yang memuat tentang konsep filsafat politik dalam pandangan Michel Foucault yaitu Buku yang ditulis Michel Foucault dan berjudul *Power/knowledge, The Archeology of Knowledge, Madness and Civilizations* serta buku yang ditulis Kacung Marijan yaitu *Sistem Politik Indonesia*.

2. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya peneliti juga menggunakan beberapa sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul, bisa lewat orang lain atau dokumen yang ditulis oleh orang lain. Dalam penelitian ini sumber sekunder merupakan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Studi literatur adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan melalui cara penelusuran dengan membaca sumber-sumber dari literatur yang ada melalui berbagai buku; artikel-artikel; jurnal serta terbitan lainnya seperti karya tulis ilmiah (skripsi dan tesis) berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti dengan tujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada.

Menurut Mirshad, penelitian kepustakaan harus dilakukan dengan:

1. Mencatat berbagai masalah yang ditemukan dalam setiap pembahasan penelitiannya.
2. Memadupadankan semua temuan baru dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.
3. Melakukan analisis berbagai temuan-temuan yang berkaitan dengan kekurangan serta kelebihan dan keterkaitannya.
4. Memberikan pendapat atau gagasan yang kritis dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan wacana yang ada sebelumnya.

Selain itu, Zed juga memaparkan beberapa langkah dalam melakukan penelitian kepustakaan, yaitu:

1. Melakukan pemilihan ide dalam topik penelitian
2. Melakukan pencarian informasi teori yang mendukung penelitian
3. Fokus penelitian diperjelas dan dipertegas
4. Mencari berbagai sumber yang akan dijadikan bahan untuk melakukan klarifikasi dan mengklasifikasi bacaan.
5. Membuat catatan kecil dari penelitian
6. Melakukan kajian dan memperbanyak bahan bacaan untuk penelitian.
7. Melakukan klasifikasi lagi bahan bacaan yang akan digunakan dalam penelitian dan membuat laporan penelitian.

Jadi penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari berbagai informasi dengan cara membaca, mencatat dan mengumpulkan berbagai sumber literatur dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Metode yang digunakan dalam penelitian serta pengumpulan dan pengolahan data-data.
2. Langkah yang digunakan pada penelitian kepustakaan.

Berguna untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam pencarian dan penyusunan data secara sistematis. Data diperoleh dari dokumentasi, hasil wawancara, serta catatan lapangan. Kemudian melakukan pelompokan pada data tersebut menjadi beberapa kategori, menjabarkan dan mensistesis data, menyusun data dengan pola, melakukan pemilihan data yang akan digunakan serta membuat kesimpulan.

Tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan terhadap informasi yang didapatkan. Mereduksi data dengan cara memilih hal pokok dan fokus pada pola atau tema yang merupakan hal penting.

2. Display Data

Setelah melakukan proses reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan data dan informasi yang disusun secara sistematis. Melakukan *display* pada data dengan mengkategorikan data dan mengelompokkan data.

3. *Content Analysis*

Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap konsep dari sebuah karya John Rawls. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut:

- a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi.
- b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan metode pendekatan terhadap data tersebut.
- c. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik.